



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2016

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

ADVERTORIAL

Daftar Isi

Daftar Isi	i
A. PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang.....	6
a. Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung	7
b. Kepegawaian	8
2. Dasar Hukum.....	11
3. Isu Strategis yang Dihadapi.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	13
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015	14
C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	15
1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018.....	15
2. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	17
3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	20
4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015.....	22
5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018.....	23
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	25
1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi.....	25
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	25
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	25
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	25
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	26
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	26
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	27
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	27
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	27

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media	29
2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	30
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	30
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	30
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	30
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	30
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	32
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	32
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	33
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	33
i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media	34
3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	35
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	35
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	36
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	36
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	38
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	38
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	38
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	38
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	39
4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	39
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	39
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	39
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	40
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	40
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	41
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	41

g.	Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	41
h.	Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	42
i.	Dokumentasi kegiatan dan kutipan media	42
5.	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	44
a.	Penjelasan umum sasaran dan indikator	44
b.	Instrumen/ cara perhitungan indikator	44
c.	Kerja nyata v.s. Rencana kerja	44
d.	Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	47
e.	Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	47
f.	Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	48
g.	Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	49
h.	Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	49
i.	Dokumentasi kegiatan dan kutipan media	Error! Bookmark not defined.
6.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50
a.	Penjelasan umum sasaran dan indikator	50
b.	Instrumen/ cara perhitungan indikator	51
c.	Kerja nyata v.s. Rencana kerja	51
d.	Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	51
e.	Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	52
f.	Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	52
g.	Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	53
h.	Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	53
7.	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	54
a.	Penjelasan umum sasaran dan indikator	54
b.	Instrumen/ cara perhitungan indikator	54
c.	Kerja nyata v.s. Rencana kerja	54
d.	Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	56

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	56
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	57
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	57
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	58
i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media	58
8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika ...	59
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	59
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	59
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	60
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	60
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	60
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	63
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	63
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	63
9. Nilai evaluasi LKIP	63
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	63
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	64
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	64
d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	64
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	65
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	65
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	66
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	66
10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	66
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	66
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	67
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja	67

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya	67
e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja	67
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	67
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	68
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	68
E. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	69
F. KESIMPULAN/ PENUTUP	70

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Diskominfo
Kota Bandung

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bandung Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

a. Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung

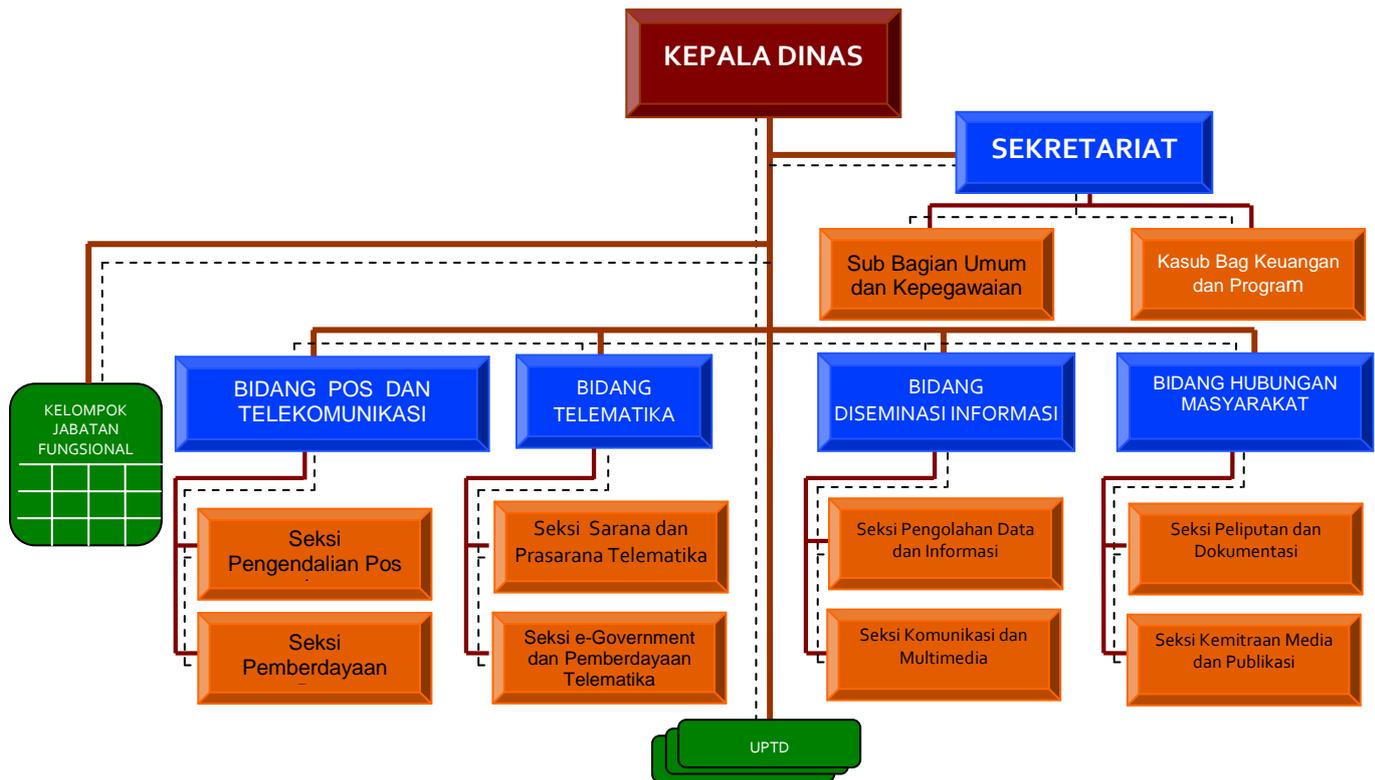
Dskominfo Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, dan Bidang Hubungan Masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan, dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. **Sekretaris, membawahi:**
 - i. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub.Bagian Keuangan dan Program
- b. **Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi :**
 - i. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
 - ii. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi
- c. **Bidang Telematika membawahi:**
 - i. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 - ii. Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika
- d. **Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:**
 - i. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - ii. Seksi Komunikasi dan Multimedia;
- e. **Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi:**
 - i. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 - ii. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi
- f. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



GAMBAR 1. ORGANIGRAM DISKOMINFO KOTA BANDUNG

b. Kepegawaian

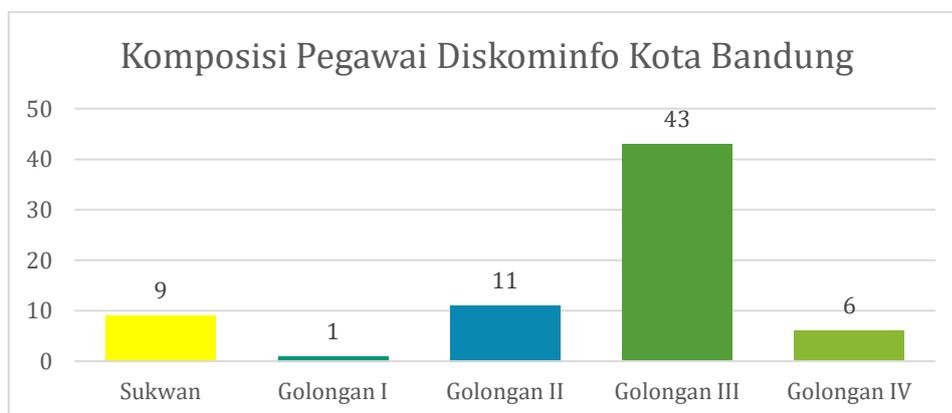
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 61 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 12 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang, serta pelaksana sebanyak 41 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.



TABEL 1. KOMPOSISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT				12		12
5	Sekretaris UPT				2		2
6	Staf					41	41
	JUMLAH		1	5	14	41	61

Selain pegawai berstatus PNS, Diskominfo Kota Bandung juga dibantu oleh 9 (Sembilan) orang tenaga sukarelawan/ honorer (sukwan). Gambar 2 menunjukkan komposisi golongan III menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kota Bandung, diikuti golongan II, dan sukwan. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 2.



GAMBAR 2. KOMPOSISI PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN GOLONGAN

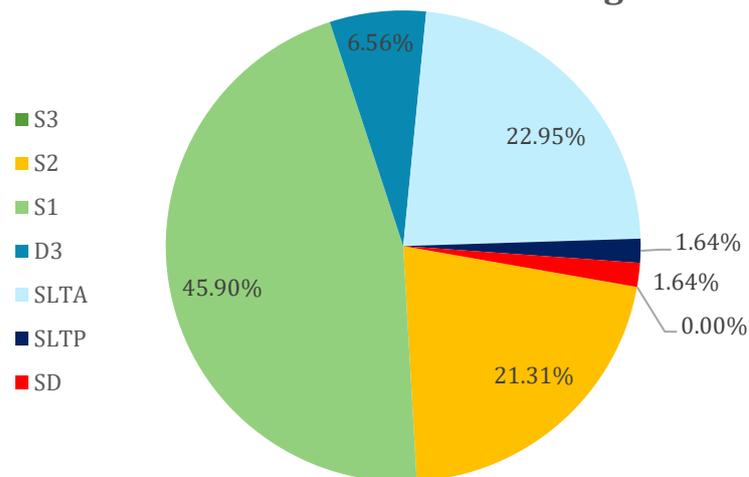
Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kota Bandung dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 2. Sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, ditunjukkan oleh gambar 3.

TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		3	1					4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT		2	10					12
5	Sekretaris UPT		1	1					2
6	Staf		5	16	4	14	1	1	41
	JUMLAH	0	13	28	4	14	1	1	61
	%	0	21.31	45.90	6.56	22.95	1.64	1.64	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Komposisi Pendidikan Pegawai Diskominfo Kota Bandung



GAMBAR 3. KOMPOSISI PENDIDIKAN PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 13 orang (21,31%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang dan 2 orang Kepala Seksi. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang (45,90%), D3 sebanyak 2 orang (6,56%), SLTA sebanyak 14 orang (22,95%), SLTP sebanyak 1 orang (1,64%), dan pegawai dengan pendidikan SD sebanyak 1 orang (1, 64%).

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

2. Dasar Hukum

Dalam menyusun LKIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berpatokan kepada dasar hukum yang berlaku terkait penyusunan dan pelaporan LKIP. Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum

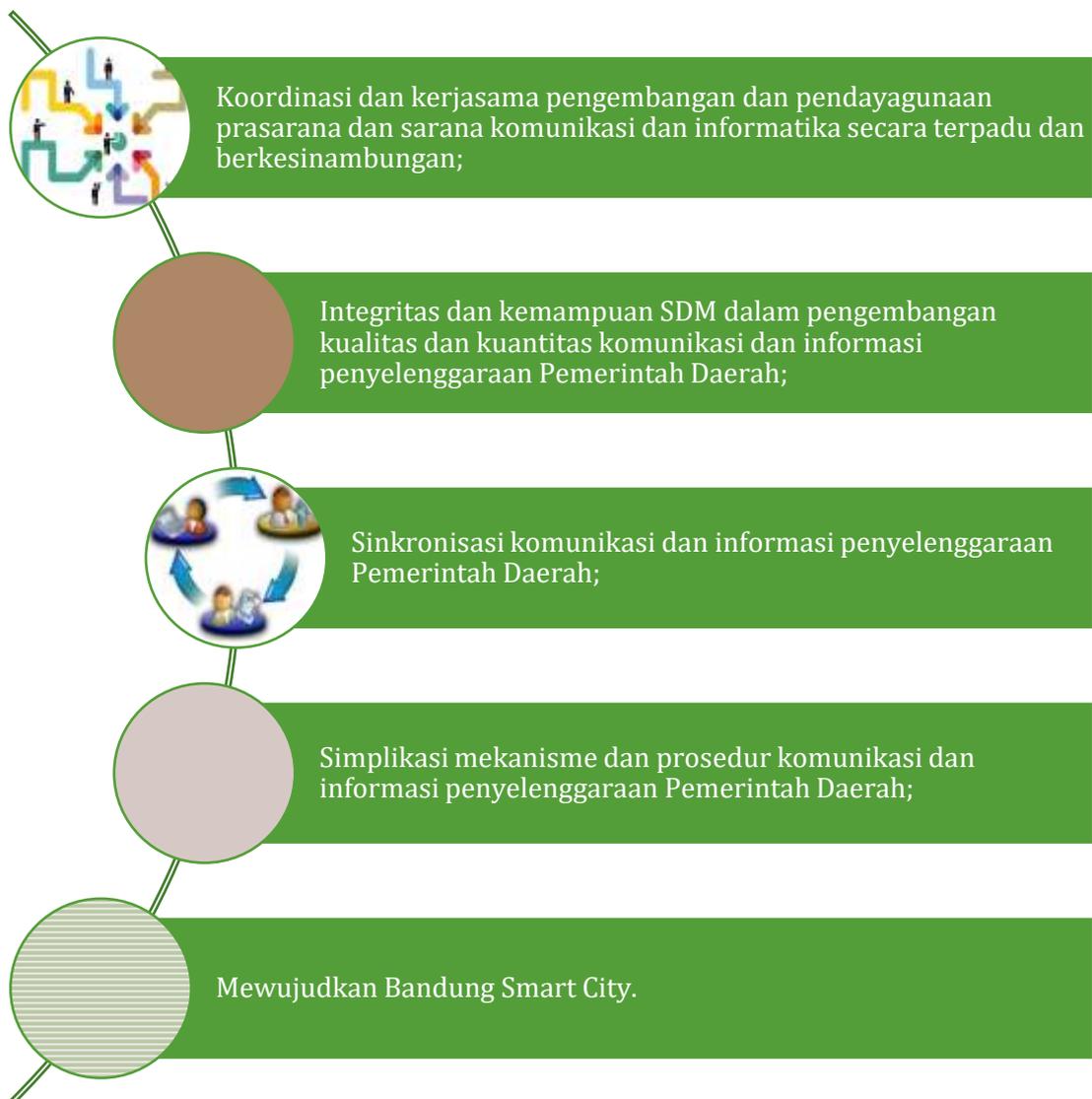
Dasar hukum menjadi acuan penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :



1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
10. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

3. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, dan media, dan teknologi, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2013-2018, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA SUBAG PROG DAN KEUANGAN TRIWULAN DI DISKOMINFO sebagai acuan. SOP ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja, serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review kemudian hari sesuai dengan kebutuhan percepatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		KADIS	SEKDIS	KABID	Kasubag PROG & KEU	Pengelola Urusan LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Diskominfo untuk memonitor Capaian Kinerja Program dan Keuangan Diskominfo		Ya				Peraturan Perundang-undangan	3 menit	Perintah Pelaksanaan	
2	Memerintahkan Ka Subbag Prog & Keu untuk membuat dan mengumpulkan Data capaian kinerja Program dan Keuangan Diskominfo			Ya			Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksanaan	3 menit	Perintah Pelaksanaan	
3	Memerintahkan Para Kepala Seksi Masing-masing /PPTK untuk membuat Laporan tentang Capaian Kinerja Program dan Keuangan di Bidang Masing-masing ke Sub Bagian Program & Keuangan Diskominfo.				Ya		Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksanaan	3 menit	Perintah Pelaksanaan	
4	Membuat konsep laporan dan surat permohonan data dan memerintahkan pengelola urusan Lakip dan Tapkin untuk mengetik serta melengkapi dokumen pendukungnya					Ya	Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksanaan	3 menit	Konsep Surat Perintah Pelaksanaan	
5	Mengetik konsep laporan surat permohonan data serta menyiapkan form pengisian data untuk Bidang-bidang di lingkungan Diskominfo				Tidak		Peraturan Perundang-undangan, konsep surat/form laporan	10 menit	Konsep Surat dan Form Pengisian Data	
6	Memeriksa dan memaraf konsep kelengkapan form laporan surat kepada Sekretaris untuk diperiksa dan di paraf		Tidak			Ya	Peraturan Perundang-undangan, konsep surat / form isian Data laporan	3 menit	Perintah pelaksanaan, konsep surat yg telah di disetujui dan Form pengisian Data	
7	Memeriksa dan memaraf form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya dan memerintahkan Kasubag Prog & Keu untuk mengirim ke Kepala Dinas untuk di tandatangani				Ya		Peraturan Perundang-undangan, konsep Surat / form laporan yang telah di disetujui	3 menit	Perintah pelaksanaan, konsep surat yang telah disetujui dan di disetujui	
8	Menandatangani surat dan Memerintahkan Sekretaris untuk mendistribusikan form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya	Tidak					konsep surat / form laporan yang berdisposisi dan disetujui kasubag prog & keu dan sekretaris	3 menit	Perintah pelaksanaan, konsep surat yang telah ditandatangani dan di disetujui	
9	Memerintahkan para Kepala Bidang untuk menindaklanjuti perintah Kepala Dinas		Ya				Surat form laporan yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan telah di disetujui	3 menit	Perintah pelaksanaan dan surat yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas	
10	Memerintahkan pengelola urusan Lakip dan Tapkin untuk menyampaikan form laporan/surat, menginventarisasi data dan entry data pada Silakip Kota Bandung				Ya		Surat yang telah ditandatangani kepala Dinas	3 menit	Perintah pelaksanaan dan surat yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas	
11	Menyampaikan form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya ke Bidang-bidang di lingkungan Diskominfo				Ya		Surat yang telah ditandatangani kepala Dinas	60 menit	Surat permohonan data dan kelengkapannya	
12	Menginventarisasi data capaian kinerja Program dan Keuangan pada Bidang-bidang sesuai waktu yang telah ditentukan				Ya		Surat permohonan data dan kelengkapannya	150 menit	Data Capaian kinerja program dan Keuangan Diskominfo	
13	Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota Bandung				Ya		Data Capaian kinerja program dan keuangan Diskominfo	30 menit	Input Data Online Capaian kinerja Program dan keuangan pada silakip	

Gambar 4. SOP Pengumpulan data LKIP Diskominfo

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 303 menit atau dalam 5 jam lebih 3 menit. Namun adalalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih diperlukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP tahun 2016 ini.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2013-2018. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.

Visi Diskominfo

“Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”

Misi Diskominfo

Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata

Tujuan Diskominfo

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Sasaran Diskominfo

Sasaran 1	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government
Sasaran 2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan
Sasaran 3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran 4	Membangun citra positif Kota Bandung di media
Sasaran 5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi

C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018

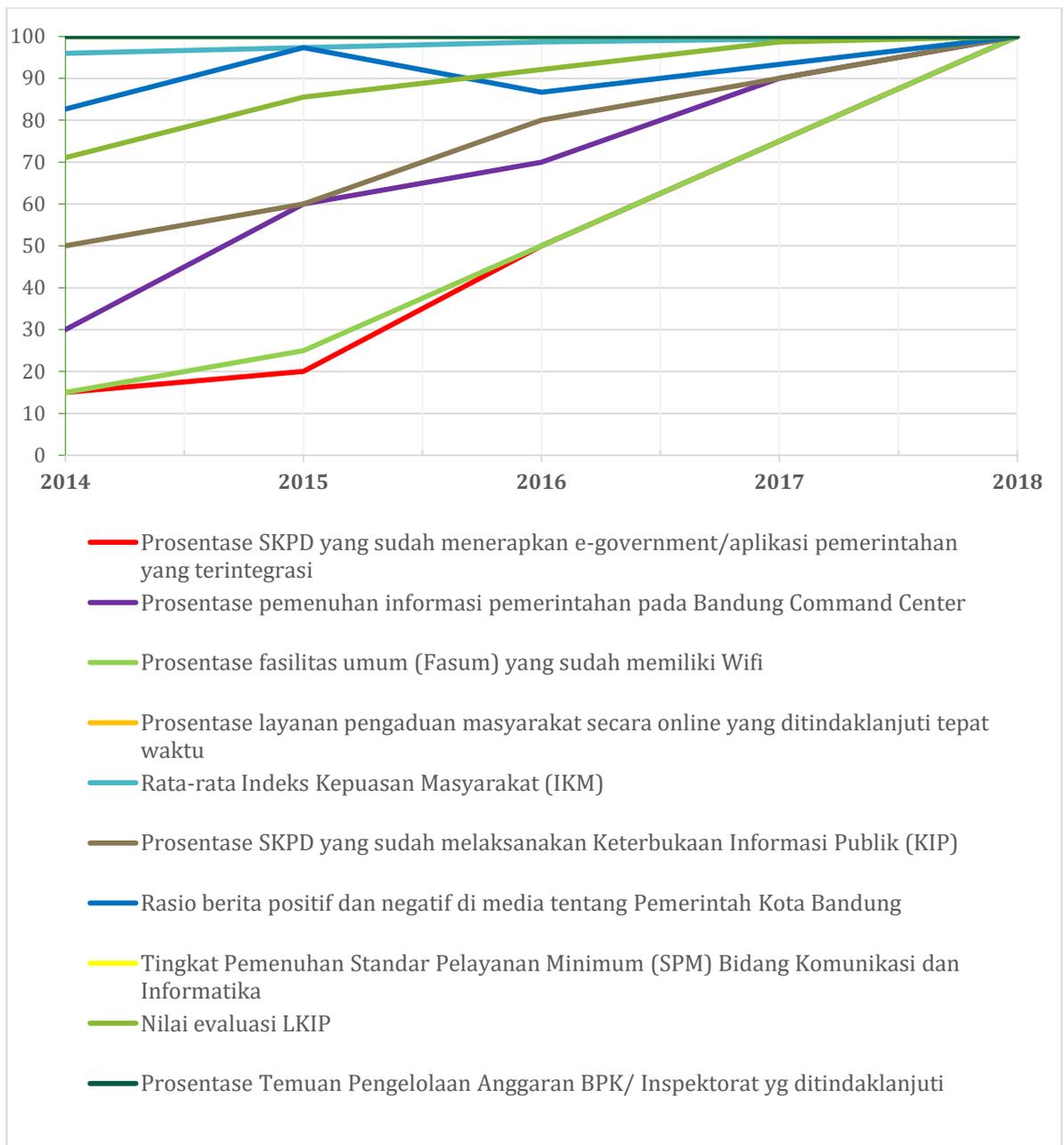
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel 3.

TABEL 3. TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15	20	50	75	100
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30	60	70	90	100
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	15	25	50	75	100
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50	60	80	90	100
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72	73	74	74.5	75
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	62:38	73:27	65:35	70:30	75:25
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54	65	70	75	76
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100

Jika target akhir pada Renstra tahun 2018 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada gambar 5. Di gambar 5, terlihat 3 (tiga) indikator tidak memiliki kenaikan target dikarenakan memiliki target 100% dari tahun ke tahun (repetitif). Beberapa target yang memiliki target 100% pada setiap tahunnya adalah:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
3. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.



GAMBAR 5. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2013-2018

Pada gambar 5 terlihat salah satu target mengalami penurunan target, yaitu target “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung.” Hal ini dikarenakan target yang tertera di Renstra 2013-2018 untuk tahun 2015 telah dikoreksi berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2014 dengan nilai rasio 73:27, sehingga 73:27 sebagai nilai capaian pada akhir tahun 2014 dijadikan target pada tahun 2015. Sedangkan target Renstra untuk tahun 2016 hingga tahun 2018, tidak mengalami perubahan. Karena sifat dari target kinerja ini sangatlah fluktuatif mengingat control pemerintah terhadap konten media tidak begitu besar, dengan digunakannya capaian akhir tahun menjadi target capaian kinerja pada tahun berikutnya dinilai sangat wajar. Terlebih lagi

capaian pada tahun 2015 ini sangat tinggi dan membutuhkan kerja keras untuk minimal mempertahankannya.

2. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

TABEL 4. KODE WARNA SKALA PENGUKURAN ORDINAL CAPAIAN KINERJA

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor: 060/151-Diskominfo Tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2016 ditunjukkan oleh tabel 5 dengan baris warna kuning. Capaian kinerja tahun 2016 ditunjukkan oleh tabel 5 di bawah ini.

TABEL 5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	20	48,00	50	17,33
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	60	60,65	70	62,29
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	25	25,00	50	60,54
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100	100,00	100	100
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	60	100,00	100	100
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	73	76,42	80	79,78
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	73:27	92,90:7,10	83:17	84,03:15,97
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	238,33	110	1454,60
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	65	65,25	70	93,21
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100	100,00	100	100

 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015			2016		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	20	48.00	240.00%	50	17,33	30,67
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	%	60	60.65	101.08%	70	62,29	88,98
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	%	25	25.00	100.00%	50	60,54	121,08
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100.00	100.00%	100	100	100
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	60	100.00	166.67%	100	100	135,13
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	73	76.42	104.68%	80	79,78	98,49
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	73:27	92.90:7.10	126.02%	83:17	84,03:15,97	101,24

Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Indikator lainnya yang masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang tidak termasuk IKU, yaitu:

TABEL 7. CAPAIAN KINERJA NON-IKU TAHUN 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015			2016		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
8	Tingkat Pemenuhan Standar Layanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika	%	100	243.89	243.89%	110	1454,60	417,99
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	65	65.25	100.38%	70	93,21	133,16
10	Turunnya Temuan BPK/ Inspektorat	%	100	100.00	100.00%	100	100	100

Dari tabel 6 dan tabel 7 didapat capaian tertinggi diraih oleh sasaran indikator nomor 1, "Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi". Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan pendukung indikator dapat berlangsung dengan lancar.

Capaian kinerja terendah dicapai oleh 3 (tiga) indikator. Walaupun termasuk rendah, ketiga indikator ini tepat mencapai target kinerja sebesar 100%. Ketiga indikator tersebut adalah: Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu, Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti. Rendahnya capaian kinerja dikarenakan sifat dari indikator itu sendiri, dimana ketiga indikator tersebut tidak mungkin memiliki capaian kinerja melebihi 100%.

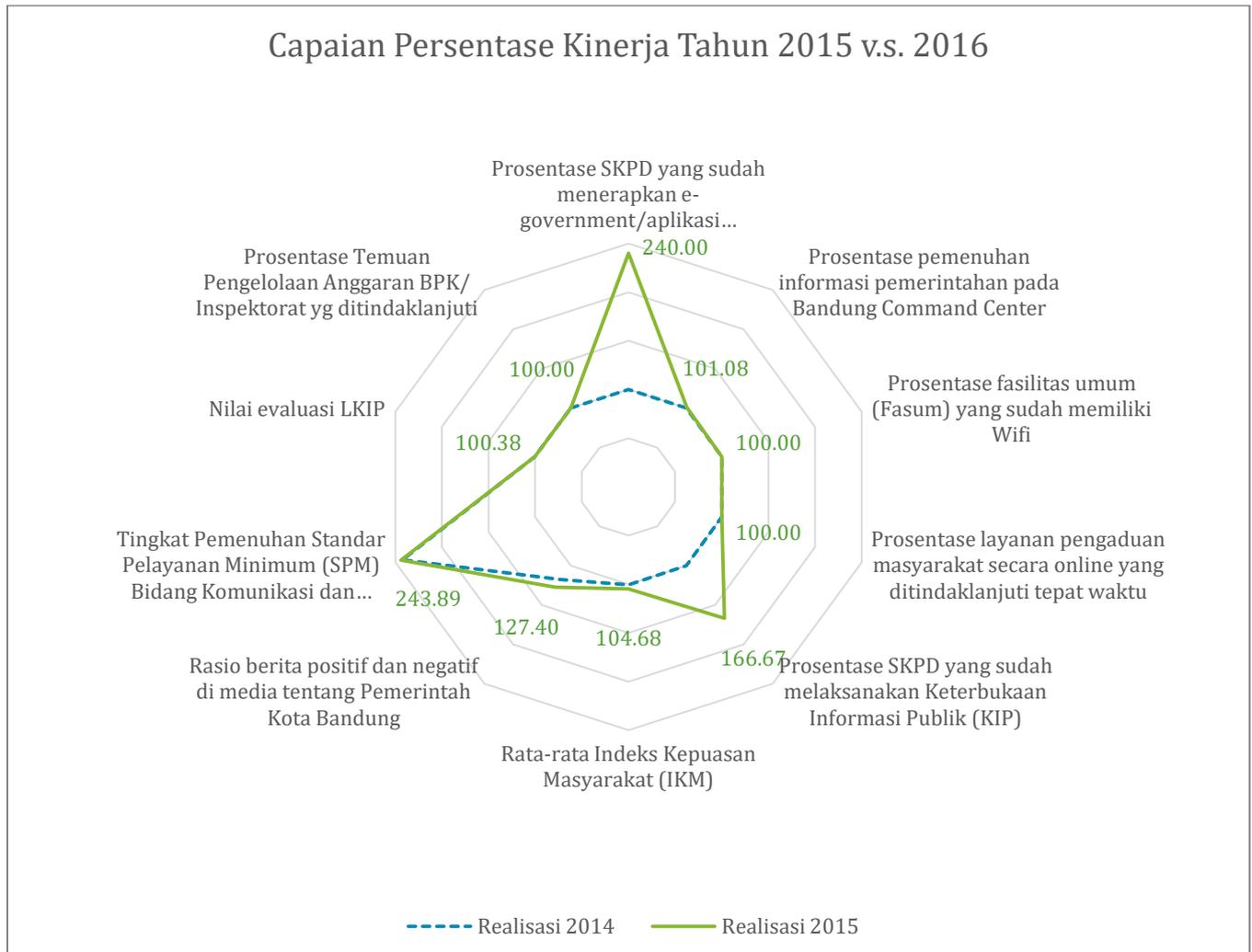
3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Pada Tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 sasaran. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:

TABEL 8. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi target (> 100)	4
2	Tercapai	3
3	Tidak Tercapai	3
	Jumlah	10



GAMBAR 6. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2015 VS 2016

Secara umum, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2015 ke tahun 2016, seperti ditunjukkan oleh gambar 6 di atas. Selisih capaian paling tinggi adalah pada sasaran “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi”, diikuti oleh sasaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”. Hanya ada satu capaian kinerja pada tahun 2016 yang berada di bawah capaian kinerja tahun 2015, yaitu pada sasaran kinerja non-IKU “Nilai evaluasi LKIP”. Walaupun terjadi penurunan, namun penurunan ini

tidaklah signifikan (selisih 0.23%, atau selisih 0.08 dalam nilai LKIP dari nilai yang ditargetkan). Terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja yang memiliki capaian yang sama dengan tahun 2015 adalah: “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi”, “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, dan “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yg ditindaklanjuti”, dimana seluruh capaian kinerja mencapai 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016

TABEL 9. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2015, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
			2015	2016
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	240.00%	30,67
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	101.08%	88,98
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	100.00%	121,08
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100.00%	100
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	166.67%	135,13
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	104.68%	98,49
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	126.02%	101,24
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	243.89%	417,99
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	100.38%	133,16
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100.00%	100

Dari tabel 10, kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian akhir tahun 2015 hingga triwulan 4 tahun 2016. Pada tahun 2015 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna abu yang menunjukkan tidak dilakukannya pengukuran kinerja pada triwulan tersebut. Capaian yang tepat berwarna hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2013-2018, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target. Pada akhir 2015, terlihat jumlah sel berwarna biru lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kondisi ini memperlihatkan semakin banyaknya sasaran indikator yang telah berhasil dicapai melebihi dari target yang ditetapkan, serta menunjukkan peningkatan kinerja Diskominfo secara keseluruhan.

Dari tabel 12 dan tabel 13, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang pengukurannya diulang pada setiap periode waktu tertentu. Artinya capaian kinerja sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi capaian kinerja pada periode pengukuran berikutnya. Indikator –indikator tersebut adalah:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

Dari tabel 13, terlihat bahwa 60% dari 10 capaian kinerja Diskominfo telah memenuhi target yang ditetapkan di Renstra Diskominfo tahun 2013-2018. Dari keadaan ini dapat dilakukan analisa, untuk indikator-indikator tersebut sekiranya dapat dilakukan evaluasi, apakah dapat ditingkatkan, baik target maupun dilakukan perubahan indikator secara keseluruhan menjadi indikator baru yang lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound) .

5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2013-2018, maka data capaian dan presentase kinerja pada tahun 2014, dan tahun 2015, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung.

TABEL 10. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15,38%	48%	50%	75%	100%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30%	60.65%	70%	90%	100%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	14,76%	25%	50%	75%	100%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50%	100%	80%	90%	100%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72,3	76.42	74	74,5	75
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	73:27	93:7	65:35	70:30	75:25
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	242,24%	100%	100%	100%	100%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54,34	65.25	70	75	76
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 11. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15,38%	48%	50%	75%	100%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30%	60.65%	70%	90%	100%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	14,76%	25%	50%	75%	100%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50%	100%	80%	90%	100%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	96,40%	101,89%	98,67%	99,33%	100%
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	97,33%	124%	86,67%	93,33%	100%
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	242,24%	238,33%	100%	100%	100%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	71,50%	85,86%	92,10%	98,68%	100%
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

 Sudah mencapai target RENSTRA 2013-2018

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Kondisi saat ini, setiap SKP dimungkinkan untuk membangun aplikasi secara mandiri. Kendala yang muncul kemudian adalah redudansi/ duplikasi aplikasi, redudansi data, hingga *overlap* proses dan fungsi dari SKPD. Untuk itu diperlukan integrasi antar aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi terkait e-government, yaitu aplikasi pendukung kinerja pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur integrasi aplikasi-aplikasi e-government seluruh SKPD. Dengan demikian, ukuran ideal dari indikator ini adalah aplikasi-aplikasi e-government milik SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Adapun target jumlah aplikasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2013-2018 adalah sebanyak 150 aplikasi, atau rata-rata 2 aplikasi per SKPD. Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{\text{Jumlah aplikasi e - Government}}{150 \text{ aplikasi}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Dari data tersebut, dengan menggunakan formula perhitungan capaian indikator 1, yaitu $26 / 150 = 17,33\%$ (**tidak mencapai target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016, sebesar 50%**). Presentase capaian kinerja pada indikator 1 "Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi adalah $17,33/50=34,66\%$

Sampai akhir tahun 2016, aplikasi yang terhubung dengan Bandung Command Center, adalah sebagai berikut:

No	Aplikasi	Pengguna
1	Aplikasi e-Budgeting	Semua SKPD
2	Aplikasi POROS	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra
3	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	Semua SKPD Pelayanan
4	Aplikasi Wirausaha Baru	Bagian Perekonomiaan
5	Aplikasi Integrasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Aplikasi Kredit Melati	Bagian Perekonomiaan
7	Aplikasi Ekonomi Kreatif	Bagian Perekonomiaan
8	Aplikasi Interface BCC	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Aplikasi Disposisi Surat	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Aplikasi Jadwal Online Walikota	KPP Kota Bandung
11	Aplikasi Tata Naskah	Setda Kota Bandung
12	Aplikasi Mobile Android Disposisi Surat	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Aplikasi Mobile iOS Jadwal Walikota	KPP Kota Bandung
14	Aplikasi Arsip Surat	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Aplikasi Monitoring CCTV	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Integrasi Sistem Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) dengan e-Remunerasi Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah
17	Pembangunan Officer Single Sign On	Badan Kepegawaian Daerah
18	Pembangunan Master Data Management Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
19	Pembangunan SIMPEG Administratif dengan fitur SSO	Badan Kepegawaian Daerah
20	Integrasi Apikasi Penggajian dengan SIMPEG dan Fitur Officer SSO	Badan Kepegawaian Daerah
21	Pembangunan Aplikasi SIMPEG Mobile	Badan Kepegawaian Daerah
22	Mengintegarsikan Aplikasi registrasi Akta Online dengan SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Penduduk Musiman Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Pengembangan Aplikasi Akta Kematian Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Pengembangan Aplikasi Mutasi Masuk Penduduk Online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Pengembangan Aplikasi Monitoring Pengelolaa Data Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan hampir **semua SKPD telah menerapkan Aplikasi e-goverment.**
- Akan tetapi, perihal integrasi antar aplikasi **sedang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017**

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2015, capaian kinerja untuk indikator yang sama adalah 48% dimana realisasi dan target triwulan 4 sebesar 48% tepat tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 2016 hanya 17,33%, dimana target triwulan 4 2016 sebesar 50% dan terjadi **penurunan capaian sebesar 30,67%..**

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah aplikasi SKPD yang terintegrasi dengan Bandung Command Center. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” Paket Kegiatan dari 3 Paket Target Kinerja Tahun Anggaran 2016”.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan di 1 Program, yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” adalah **Pengelolaan Bandung Command Center**. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 8.689.284.500,00 terrealisasi Rp. 3.425.963.619,00 (39,43 %)

Kegiatan pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” telah menghasilkan output:

- ✓ Perangkat Server untuk Bandung Command Center;
- ✓ Perangkat lunak/ aplikasi, dan Sistem Informasi untuk Bandung Command Center;
- ✓ Informasi dari setiap SKPD yang masuk ke Bandung Command Center.

f. **Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2015 ini diantaranya:

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini diantaranya:

- ❖ Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan;
- ❖ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak Swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama.
- ❖ Penyelenggaran Kegiatan lebih sederhana

g. **Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran**

- ❖ Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi belum tersentralisasi di Bidang Telematika pada tahun 2014, sehingga capaian jumlah pembangunan/pengembangan aplikasi pada tahun tersebut tidak tercapai,

hal tersebut mengakibatkan capaian untuk tahun-tahun berikutnya menjadi rendah

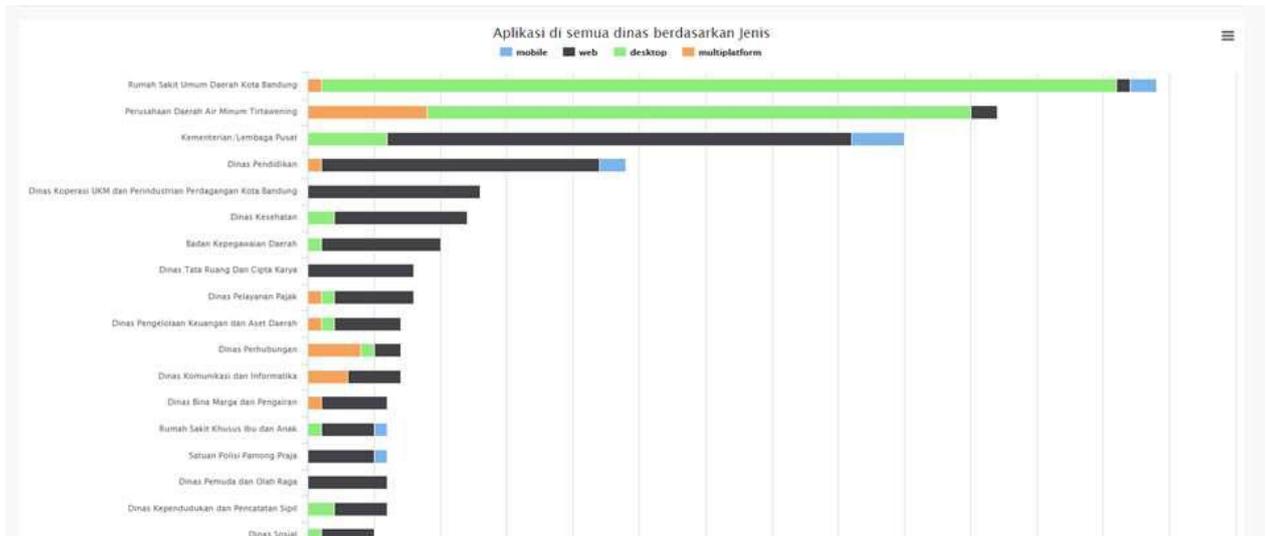
- ❖ Sisa lelang dan sisa pengadaan barang jasa (efisiensi)
- ❖ Pengadaan terkendala koordinasi
- ❖ Munculnya hambatan teknis
- ❖ Kebijakan birokrasi penyelenggaraan pekerjaan yang berubah turut berkontribusi atas perlambatan kinerja
- ❖ Adanya indent barang, sehingga pengadaan barang keluar jadwal yang ditargetkan.
- ❖ Penyelenggaraan Kegiatan yang membutuhkan lebih banyak waktu dan orang di dalamnya

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Sentralisasi Pembangunan/pengembangan aplikasi se-Pemkot Bandung dilakukan di Diskominfo untuk memudahkan pengendalian
- ❖ Menentukan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku;
- ❖ Percepatan proses lelang, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/ kegiatan;
- ❖ Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan, dan dengan pihak pelaksana pekerjaan/ kegiatan/ pengadaan barang/ jasa
- ❖ Memperhatikan kosekuensi dari setiap proses teknis yang sekiranya dapat mengganggu waktu, dan teknis pekerjaan.
- ❖ Intensifikasi Komunikasi Komponen-2 yang terlibat kegiatan tersebut untuk mempercepat capaian Target Kinerja

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media



GAMBAR 7. REKAPITULASI APLIKASI BEBERAPA SKPD

Status Penggunaan	Jumlah	Jenis	Jumlah	Status Kepemilikan	Jumlah
direncanakan	41	Web	199	Kepemilikan Sendiri	304
dibangun	40	Mobile	12	Kepemilikan Pusat	48
diujicoba	33	Desktop	125	Hibah	10
dioperasikan	232	Multiplatform	27	Total	362
tidak operasional	17	Total	363		

SKPD	Aplikasi (milik)	Aplikasi (pengguna)	Jenis				Status Penggunaan					Status Kepemilikan		
			Web	Mobile	Desktop	Multiplatform	Direncanakan	Dibangun	Diujicoba	Dioperasikan	Tidak Operasional	Sendiri	Pusat	Hibah
1. Badan Kepegawain Daerah	10	16	9	0	1	0	1	1	3	5	0	9	0	1
2. Badan Kestuhan Bangsa, Perlindungan & Pemberdayaan Masyarakat	3	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2	7	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3	8	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7	5	0	0	0	4	0	0	1	0	5	0	0
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	7	4	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	1
7. Bagian Hukum dan HAM	2	7	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0
8. Bagian Kerjasama	2	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
9. Bagian Kesra dan Komunitas	1	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

GAMBAR 8. REKAPITULASI APLIKASI BERDASARKAN KATEGORI TERTENTU

2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Tata kelola pemerintahan berbasis e-government adalah salah satu sasaran terlaksananya Reformasi Birokrasi. Tata kelola berbasis e-government meliputi tersebarnya informasi pemerintahan secara cepat dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Dari kebutuhan tersebut dibentuklah Bandung Command Center sebagai muara informasi pemerintahan dan pengolahan data untuk membantu dan mempercepat eksekutif dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena fungsinya sebagai pusat informasi, sistem yang berada di Bandung Command Center perlu secara waktu-nyata terintegrasi dengan berbagai aplikasi e-government yang dimiliki setiap SKPD.

Pemenuhan informasi ini dapat berupa aplikasi kiosk, website maupun aplikasi berbasis mobile. Tantangan dari indikator ini adalah: SKPD sudah memiliki aplikasi/ sudah merancang aplikasi, namun belum terintegrasi, dan SKPD vital/sebagai pendukung e-government namun sama sekali belum memiliki aplikasi.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Target yang digunakan indikator ini adalah target kualitatif berdasarkan jumlah SKPD yang terkoneksi data dengan Bandung Command Center. Jumlah aplikasi didapatkan dari basis data aplikasi yang terdaftar dan sudah terintegrasi dengan Bandung Command Center

Menggunakan formulasi perhitungan:

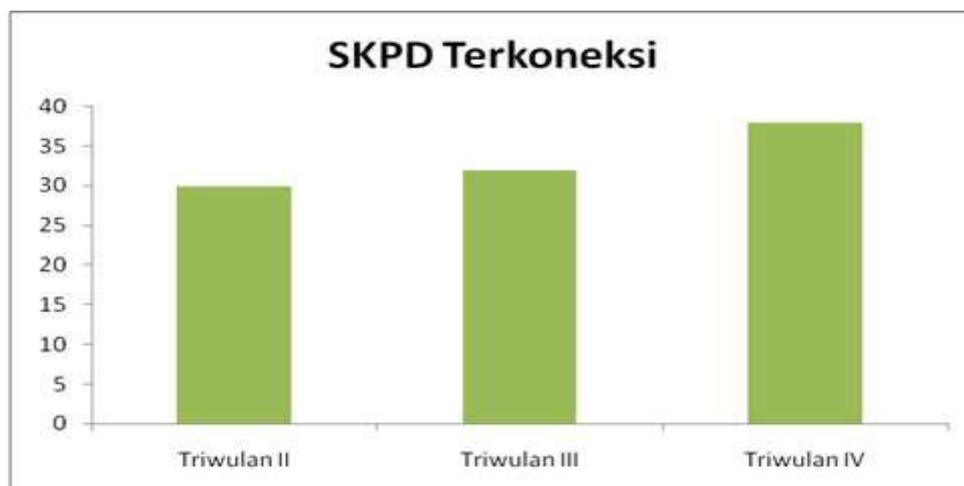
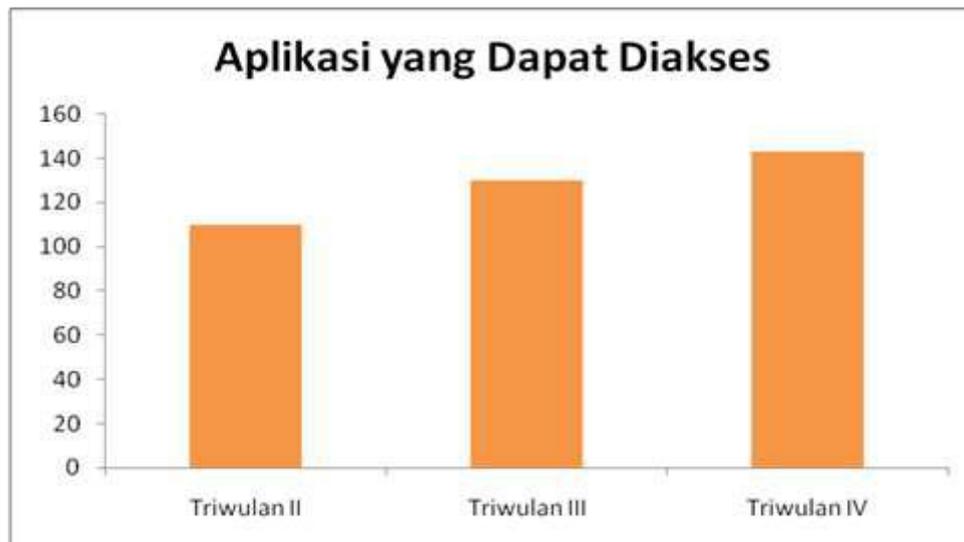
$$\text{Capaian indikator 2} = \frac{\text{Jumlah SKPD terintegrasi}}{61} \times 100\%$$

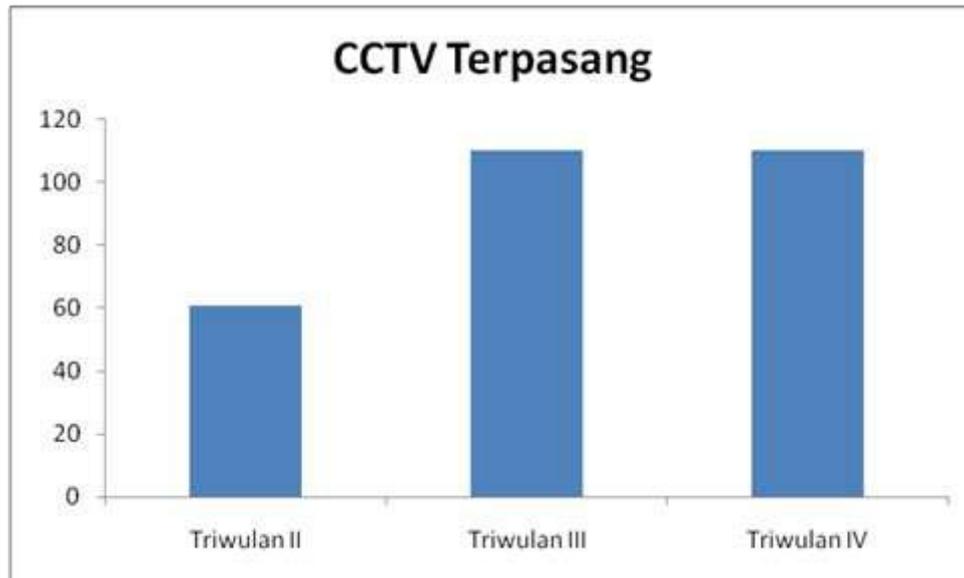
c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Didapatkan data 38 (tiga puluh tiga) SKPD dari total 61 (enam puluh satu) SKPD telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Dengan menggunakan formula di poin (b) di atas, didapatkan angka capaian indikator 2 sebagai berikut: 38 SKPD Terintegrasi/61 target seluruh SKPD = **62,29 % (di bawah target 70% yang direncanakan dalam Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016)**. Sedangkan untuk presentase capaian kinerja untuk indikator "Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center" adalah $62,29/70 = 88,98\%$ (**tidak mencapai target 100%**)

Adapun detail 38 SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center adalah:

KEC. BAWET	DISPERTAPA	DISTARCIP	PD. BPR
KEC. COBLONG	DINAS TENAGA KERJA	DBMP	PDAM
KEC. CINAMBO	DINAS KUKM & INDAG	BAGIAN ORPAD	RSKIA
KEC. ASTANAANYAR	DINAS PERHUBUNGAN	BKD	INSPEKTORAT
DISYANJAK	BAGIAN HUKUM & HAM	BAPPEDA	DPPK
DISPORA	DINAS SOSIAL	BAGIAN UMUM	DISDIG
DINAS KESEHATAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	BPLH	BAGIAN HUKUM
DISBUDPAR	DPKAD	SETWAN	KAPUSARDA
DINAS KEBAKARAN	DISDUKCAPIL	TU SETDA	
DISKOMINFO	BAGIAN PEREKONOMIAN	PD. PASAR	





d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2015, target kinerja indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah sebesar 60,65%. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja sebesar **101,08%**. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2016 yang sebesar 62,29%, **penurunan capaian kinerja sebesar 38.79%**, dikarenakan ada beberapa SKPD yang sudah tidak aktif.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah

- Per tanggal 21 Desember 2016, terdapat 38 SKPD yang terkoneksi ke Bandung Command Center dari total 61 SKPD yang ada di Kota Bandung. Sebelumnya, hanya 32 SKPD yang terkoneksi ke Bandung Command Center.
- Per tanggal 21 Desember 2016, jumlah aplikasi yang dapat diakses oleh Bandung Command Center berjumlah 143 aplikasi. Sebelumnya aplikasi berjumlah 130 aplikasi.
- Per tanggal 21 Desember 2016, jumlah CCTV yang telah dipasang berjumlah 110 buah. Pemasangan CCTV bertujuan untuk memantau kondisi kota Bandung. Kondisi yang terpantau antara lain: pelanggaran lalu lintas, PKL, dan banjir. Tahun lalu jumlah CCTV yang terpasang hanya 61 buah.
- Dibuatnya akun sosial media Twitter Bandung Command Center memudahkan hubungan kerjasama dengan SKPD dan organisasi lain serta memudahkan penyampaian program-program pemerintah.

- Terjalinnnya hubungan kerjasama dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan kota. Kerja sama yang dilakukan selain dengan SKPD dilakukan juga dengan Polrestabes Bandung dan PRFM News Channel.
- Melalui kerja sama yang telah dilakukan dengan Bandung Command Center, program-program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan di **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 9.840.900.000,00, terealisasi Rp. 4.763.891.155,00 (48,41%), menghasilkan output produk kebijakan, dan kajian-kajian bidang telematika.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” pada triwulan 4 ini adalah

1. Dibuatnya akun sosial media Twitter Bandung Command Center memudahkan hubungan kerjasama dengan SKPD dan organisasi lain serta memudahkan penyampaian program-program pemerintah.
2. Kerjasama yang solid dengan SKPD terkait (DBMP, Dishub, DPPK dan kecamatan-kecamatan) melalui media sosial Twitter membuat informasi yang masuk ke Bandung Command Center lebih cepat dikoordinasikan dan ditangani.
3. Informasi yang masuk dan keluar dari Bandung Command Center didukung dan tervalidasi oleh media lain

Walikota Bandungpun mendukung dengan cara meminta agar setiap aplikasi di up-date dengan data terbaru.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” pada triwulan 4 ini adalah

1. Kurangnya pengawasan langsung dari eksekutif menjadikan Bandung Command Center belum sepenuhnya berfungsi sebagai *decision support*.
2. Masih banyak SKPD yang belum memperbaharui aplikasinya dan tidak melakukan koordinasi saat ada perubahan aplikasi
3. Informasi yang masuk ke Bandung Command Center beraneka ragam dan belum sepenuhnya dapat diklasifikasikan
4. Perubahan komposisi operator karena adanya pergeseran pegawai (shift dan masa kontrak)

5. Masih kurangnya keefektifan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dengan SKPD.

SKPD yang sudah memiliki aplikasi dan terintegrasi pun, terkadang aplikasinya tidak dapat diakses. Aplikasi yang tidak dapat diakses juga belum dapat diperbaiki dan dianalisis masalahnya oleh praktisi IT SKPD terkait.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat dengan melakukan:

- ❖ Jika ada aplikasi SKPD yang telah terintegrasi namun tidak dapat diakses, kemudian praktisi IT SKPD terkait juga tidak dapat memperbaiki dan menganalisis masalah aplikasi tersebut, mohon kontak vendor aplikasi terkait agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
- ❖ Koordinasi antara Kepala SKPD dengan operator Bandung Command Center perlu ditingkatkan
- ❖ Pengkategorian disesuaikan dengan Kondisi dan Permasalahan di setiap Kota.

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media

Kutipan Media & Referensi/ URL

Kutipan Media & Referensi/ URL



Aplikasi Seluruh SKPD akan Terintegrasi di Bandung Command Center

Rabu 07 Dec 2016, 15:55 WIB

Avilia Nurmatani - detikNews

0 komentar

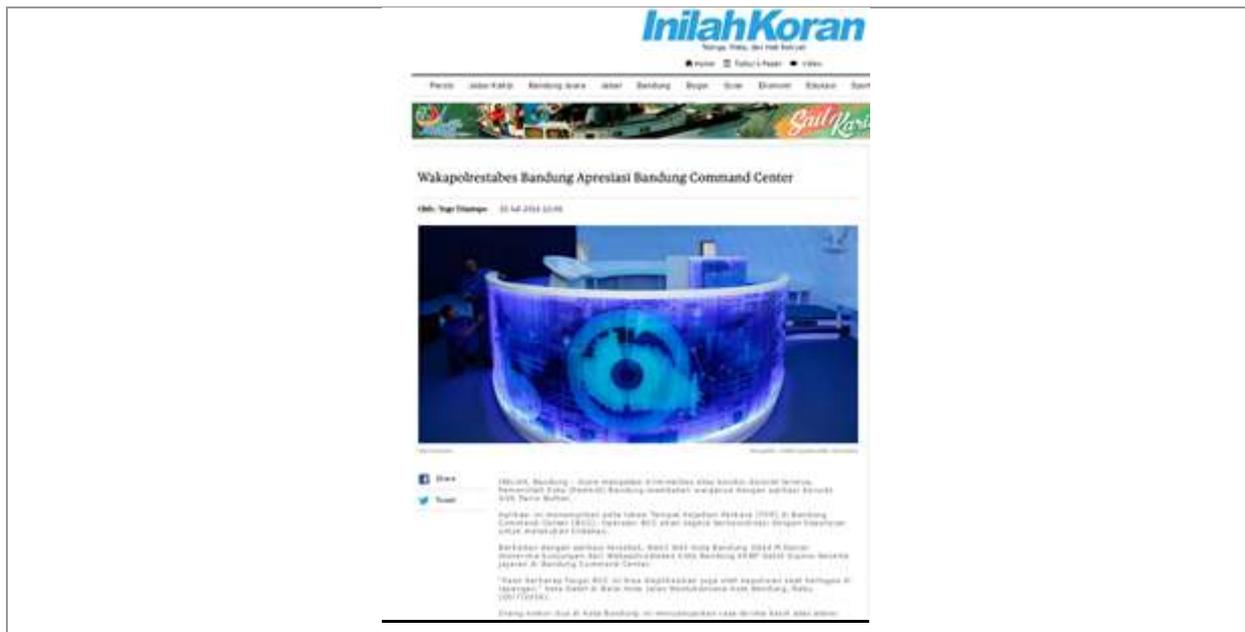
Bandung - Diskominfo Kota Bandung menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Infrastruktur sebagai Penunjang Smart City di Grand Hotel Panghegar Bandung, Rabu (7/12/2016). Rakor tersebut dilakukan agar seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bisa saling terintegrasi untuk mewujudkan Bandung Smart City.

Kepala Dinas Diskominfo Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi menuturkan, konsep smart city akan sukses jika terintegrasi. Dalam artian, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan sektor swasta juga harus berpartisipasi.

"Tantangan mewujudkan kota cerdas dengan mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi komunikasi sangatlah kompleks. Sehingga butuh terus inovasi, serta kerjasama yang kuat dari berbagai pihak," tutur Asep.

Lebih lanjut Asep mengatakan, untuk menunjang Smart City, ratusan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang telah dibangun, juga perlu dukungan infrastruktur yang memadai.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3365344/aplikasi-seluruh-skpd-akan-terintegrasi-di-bandung-command-center>



<http://www.inilahkoran.com/berita/bandung-juara/59739/wakapolrestabes-bandung-apresiasi-bandung-command-center>



<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/07/jalan-cihampelas-ditutup-10-hari-384089>

3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja, bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, baik usia tua, muda, professional, pengusaha, pelajar, hingga anak-anak, dan angka penetrasi dan literasi Internet kian menaik seiring mudah dan murah nya akses terhadap Internet.

Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan media dasar komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi taman dan area publik, pusat transportasi, dan tempat ibadah (berdasarkan permintaan). Bandung menuju Smart City meng-amanahkan interaksi dan turut serta warga dalam pembangunan kota. Pembangunan titik-titik wifi ini membantu mewujudkan konektifitas, baik antar warga, dan warga dengan pemerintah.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Indikator kinerja dihitung berdasarkan capaian pemasangan titik Wifi yang aktif terkoneksi dengan Internet, dibandingkan dengan target pemasangan yaitu 332 titik Wifi di Kota Bandung, menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 3} = \frac{\text{Jumlah fasum terpasang wifi}}{332} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Untuk capaian indikator 4 didapat: $201 / 332 = 60,54\%$ (**melebihi target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016**). Persentase capaian indikator terhadap target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016 untuk indikator "Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi" adalah: $(60,54\% / 50\%) \times 100\% = 121,08\%$.

Wifi yang sudah terpasang tahun 2016

No	CID	Nama	Status	Jml Wifi	Keterangan
1	CS-CID-6-2016-0540	Taman Flexi	P	3	On
2	CS-CID-6-2016-0565	Taman Cibeunying Park	P	4	On
3	CS-CID-6-2016-0541	Masjid PUSDAI	P	5	On
4	CS-CID-6-2016-0583	Taman Anggrek Superhero	P	4	On
5	CS-CID-6-2016-0546	Taman Cempaka	P	4	On
6	CS-CID-6-2016-0555	Taman Pustaka Bunga	P	5	On
7	CS-CID-6-2016-0547	Taman Supratman	P	3	On
8	CS-CID-8-2016-0594	Taman Pramuka	P	8	On
9	CS-CID-6-2016-0551	Museum Sri Baduga	P	3	On
10	CS-CID-6-2016-0601	Balai Pertemuan Ridwan Kamil	P	2	On
11	CS-CID-6-2016-0589	Taman Panatayuda	P	2	On
12	CS-CID-6-2016-0544	Taman Musik Centrum	P	6	On
13	CS-CID-6-2016-0554	Taman Teuku Umar	P	3	On
14	CS-CID-6-2016-0571	Masjid Al-Jihad	P	3	On
15	CS-CID-6-2016-0572	Masjid Al-Adla	P	3	On
16	CS-CID-6-2016-0573	Masjid Al-Hikmah	P	2	On
17	CS-CID-6-2016-0549	Masjid Raya Cipaganti	P	4	On
18	CS-CID-6-2016-0553	Ponpes Daarut Tauhiid	P	4	On

		Bandung			
19	CS-CID-6-2016-0545	Masjid Salman ITB	P	4	On
20	CS-CID-6-2016-0582	Taman Bima	P	3	On
21	CS-CID-6-2016-0562	Taman Restorasi Sungai Cikapayang	P	3	On
22	CS-CID-6-2016-0560	Masjid Al Ukhuwah	P	4	On
23	CS-CID-6-2016-0543	RSUD Kota Bandung	P	4	On
24	CS-CID-6-2016-0613	Masjid Raya Ujung berung	P	4	On
25	CS-CID-6-2016-0574	Masjid Miftahul Hidayah	P	2	On
26	CS-CID-6-2016-0577	Masjid Al-Hidayah	P	3	On
27	CS-CID-6-2016-0558	Masjid Al Manar	P	3	On
28	CS-CID-6-2016-0570	Masjid Agung Buah Batu	P	5	On
29	CS-CID-6-2016-0599	Lapang Gasmin Antapani	P	3	On
30	CS-CID-6-2016-0579	Taman 3G	P	2	On
31	CS-CID-6-2016-0568	Gereja HKBP	P	2	On
32	CS-CID-6-2016-0566	Masjid Istiqomah	P	4	On
33	CS-CID-6-2016-0552	Masjid Mujahidin	P	3	On
34	CS-CID-6-2016-0561	Ponpes Daaruttaubah	P	3	On
35	CS-CID-6-2016-0578	Taman Pendopo Walikota	P	2	On
36	CS-CID-6-2016-0550	Museum Asia Afrika	P	4	On
37	CS-CID-6-2016-0588	GOR C-Tra	P	2	On
38	CS-CID-6-2016-0575	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	P	4	On
39	CS-CID-6-2016-0569	Balai Kota Bandung	P	6	On
40	CS-CID-6-2016-0618	Taman Film	P	4	On
41	CS-CID-6-2016-0597	Taman Sauyunan Baraya	P	2	On
42	CS-CID-6-2016-0603	Taman Diskamtam	P	3	On
43	CS-CID-6-2016-0548	Taman Lansia	C	2	On
44	CS-CID-8-2016-0598	Pet Park	C	1	On
45	CS-CID-6-2016-0556	Taman Tegalega	C	2	On
46	CS-CID-6-2016-0564	Cikapundung River Spot	C	3	On
47	CS-CID-6-2016-0539	Taman Kota Cikapayang Dago	C	3	On
48	CS-CID-8-2016-0563	Taman Vanda	C	1	On
49	CS-CID-6-2016-0542	Taman Alun-alun Ujung Berung	C	2	On
50	CS-CID-8-2016-0586	Taman Monumen Perjuangan Rakyat	C	2	On
51	CS-CID-8-2016-0585	Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani	C	4	On
52	CS-CID-8-2016-0538	Terminal Leuwipanjang	C	4	On
53	CS-CID-8-2016-0592	Terminal Cicaheum	C	3	On
54	CS-CID-8-2016-0580	Taman Alun-alun Bandung	C	4	On
55	CS-CID-8-2016-0537	Taman Pasupati/Taman Jomblo	C	4	On
56	CS-CID-6-2016-0536	Teras Cikapundung	C	3	On
57	CS-CID-8-2016-0596	Kebun Binatang Bandung	C	1	On Progress
58	CS-CID-8-2016-0587	Stasiun Bandung	C	4	On Progress

59	CS-CID-8-2016-0591	Stasiun Kiara Condong	C	4	On Progress
60	CS-CID-8-2016-0584	Bandara Husein Sastranegara	C	6	Failed
61	CS-CID-8-2016-0581	Sanggar Seni	C	1	Failed
		Total		201	201

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2015, capaian kinerja indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah menacapai 25%, mencapai target triwulan 4 tahun 2015 sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2016, terjadi **peningkatan capaian kinerja sebesar 35,54%**. Dari sisi capaian kinerja terhadap target triwulan 4 2016 terjadi peningkatan sebesar 21,08%

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah jumlah titik pemasangan Wifi di fasilitas umum. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” telah **berhasil memenuhi target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2016.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Anggaran Tahun 2016 dilaksanakan di 1 (satu) Program, yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah **Pengkajian dan pengembangan sistem informasi**. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 9.547.959.250,00 dan sudah teresalisasi pada triwulan 4 sebesar 8.576.071.364,00 (89,82%), dan menghasilkan output :

1. Wifi yang terpasang : 201 Access Point tersebar di 61 Fasilitas Umum
2. Bandwidth Wifi di fasum, sekolah-sekolah, beberapa SKPD, beberapa Kecamatan, dan Taman-taman kota.
3. Aplikasi terkait monitoring dan perawatan jaringan Internet beserta perawatannya.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah

- ❖ Tersedianya jaringan listrik ke lokasi fasilitas umum
- ❖ Izin Instalasi perangkat di fasilitas umum

- ❖ Adanya system monitoring realtime kondisi perangkat di lapangan
- ❖ Eskalasi penyelesaian gangguan kurang dari 1 x 24 jam (tergantung jenis gangguan)

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Pada indikator "Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi, memiliki hambatan diantaranya yaitu :

- ❖ Ijin intalasi tidak diberikan di tempat-tempat tertentu (contoh Gereja Katedral)
- ❖ Tidak bisa digunakannya jaringan listrik dari Penerangan Jalan Umum (terdapat beberapa kasus)
- ❖ Tidak diberikannya akses jaringan listrik di salah satu lokasi (contoh taman inkruasi dari PB.Angkat Besi)
- ❖ Ijin Instalasi tidak diberikan karena lokasi sedang dalam tahap pembangunan (contoh Gasibu)

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Tindak lanjut agar pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru
- ❖ Melakukan koordinasi dengan DBMP
- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru
- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru

4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Layanan pengaduan masyarakat ditangani secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis LAPOR! UPT LAPOR! menerima pengaduan melalui beberapa media, seperti pengaduan tatp muka langsung, melalui telepon, melalui SMS, koran, radio, surel, melalui media social, ataupun melalui website/ aplikasi LAPOR!

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 4 dilakukan dengan melihat data total jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu yang masuk ke LAPOR dibandingkan dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke LAPOR. Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 4} = \frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan yang masuk}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Jumlah laporan yang diterima oleh UPT lapor selama 2016 adalah



Data Tanggal 27 Desember 2016

Bulan	Jumlah Laporan Masuk
Oktober	324 laporan
November	262 laporan
Desember	147 laporan
TOTAL	733 laporan

Total laporan pada triwulan 4 ini adalah: 733 (Tujuh ratus tiga puluh tiga) laporan, dan seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” adalah: $733/733 = 100\%$ (**tepat mencapai target triwulan 4 tahun 2016**), dan capaian kinerja adalah $100/100=100\%$ (tepat mencapai target triwulan 4 tahun 2016)

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Capaian kinerja triwulan 4 pada tahun 2016 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan 4 Tahun 2015, menunjukkan **konsistensi kinerja** dalam menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan capaian kinerja 100% dibandingkan dengan 100%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” ini adalah:

- ✓ Tertanganinya pengaduan masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas.
- ✓ Terjalannya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
- ✓ Terjalannya hubungan kerjasama dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan kota
- ✓ Tersampainya program-program pemerintah kepada masyarakat

Indikator Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” menggunakan mata anggaran Program **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, melalui kegiatan **Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi** yang dianggarkan sebesar Rp 2.842.232.000,00 dimana sudah direalisasi sebesar Rp 2.734.296.276,00 atau 96,20 %

Dengan melihat capaian indikator dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan untuk indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, **telah berhasil mencapai target kinerja** sesuai Renstra Diskominfo yang telah ditetapkan.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2016 ini adalah:

- ❖ Pengawasan langsung oleh Pimpinan Daerah (Walikota) serta menjadikan pengelolaan LAPOR salah satu tolok ukur penilaian kinerja

- ❖ Tim Pengelola dan tugas-tugas fungsi dari masing-masing personel ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Bandung No. 488/Kep.703-Diskominfo/2016 Tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- ❖ Mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bandung No. 1263 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2016 ini adalah:

- Keanekaragaman laporan sehingga tidak semua laporan dapat tertangani dalam 5 hari kerja (tergantung tingkat kesulitan penanganan dan anggaran).
- Koordinasi antara Kepala SKPD dengan admin yang perlu ditingkatkan
- Perubahan komposisi admin karena adanya pergeseran pegawai (mutasi dan promosi)
- Belum ada mekanisme yang dapat memonitor terselesaikan tidaknya (secara real) suatu laporan dan juga untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat
- Analisa data/pengkategorian bidang yang tampil di website LAPOR masih berskala nasional, belum disesuaikan dengan permasalahan masing-masing daerah.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Pengkategorian disesuaikan dengan Kondisi dan Permasalahan di setiap Kota.
- ❖ Perlu adanya mekanisme khusus untuk memonitor terselesaikan tidaknya (secara real) suatu laporan
- ❖ Perlu survey atas kepuasan layanan LAPOR secara reguler
- ❖ Untuk memperbaiki kualitas jawaban, perlu adanya beberapa hal sebagai berikut
 - ✓ Tanggapan /jawaban SKPD adalah mewakili Walikota, bukan hanya mewakili SKPD
 - ✓ Perlu adanya peningkatkan komitmen dari pimpinan SKPD dalam menanggapi keluhan masyarakat yang diwujudkan dalam jawaban/ tanggapan tertulis dan tindak lanjut yang real dilapangan

- ✓ Jawaban yang memerlukan tindak lanjut lapangan, seyogyanya disusun setelah dilakukan observasi atau pendalaman laporan dengan tetap memperhatikan kecepatan respon (5 hari kerja)
- ✓ Setiap laporan/ pengaduan harus dilaporkan kepada kepala SKPD masing-masing sehingga diketahui dan ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan
- ✓ Pentingnya keseriusan dalam menyusun jawaban agar dapat benar-benar member solusi
- ✓ Untuk menambah bobot jawaban dapat juga ditambahkan informasi dan sosialisasi kegiatan/ program pemerintah kota yang telah, sedang dan akan dilaksanakan
- ✓ Pentingnya informasi kepastian atau/ perkiraan batas waktu penyelesaian laporan
- ✓ Dimungkinkan perlunya mencantumkan nama pejabat yang berwenang dan jabatannya dalam jawaban/ tanggapan LAPOR

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media

Kutipan Media & Referensi/ URL
<p>Kota Bandung Jadi Percontohan LAPOR! - SP4N Oleh: Gita Pratiwi 20 November, 2016 - 09:09</p> <p style="text-align: right;"><u>BANDUNG RAYA</u></p>  <p>BANDUNG, (PR).- Sejak Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) diluncurkan ke publik pada 2013, Pemerintah Kota Bandung telah menerima 12.131 laporan per Oktober 2016. Pemerintah Kota Bandung memiliki perhatian khusus LAPOR ini karena akan berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik terhadap layanan pemerintahnya. Dengan komitmen itu, tak heran kalau Pemkot Bandung dijadikan salah satu percontohan program LAPOR - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p style="text-align: center;">http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/20/kota-bandung-jadi-percontohan-lapor-sp4n-387446</p>

5. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Walikota Kota Bandung di atur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung disusun peraturan Walikota Nomor **480/Kep.179.Diskominfo/2015** tentang PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Perwal tersebut telah melingkupi peran serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kemudian PPID pembantu yang telah ditetapkan tersebut telah menjalankan tugasnya untuk memberikan, serta melayani permintaan informasi publik, terkecuali informasi publik yang dikecualikan. Seluruh kegiatan PPID dapat dilihat melalui website PPID Kota Bandung di <http://ppid.bandung.go.id/>

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Formulasi perhitungan presentase kinerja indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah dengan melihat jumlah SKPD dan KEcamatan yang telah tergabung kedalam PPID dan turut melaporkan data-data mereka terkecuali data yang dikecaulikan. Formula tersebut dibuat dalam bentuk diformalkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 5} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang melaporkan data}}{\text{Jumlah SKPD id Kota Bandung}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Dalam lampiran Perwal nomor 480 tahun 2015 tersebut, disebutkan PPID Pembantu yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut:

NO	SKPD
1	Inspektorat
2	Sekretariat DPRD
3	Asisten Pemerintahan
4	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
5	Asisten Administrasi Umum
6	Satpol PP
7	Bagian Hukum & HAM
8	Bagian Orpad

9	Bagian Kerjasama Daerah Setda
10	Bagian PSDA
11	Bagian Perekonomian
12	Bagian Tata Usaha Setda
13	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
14	Bagian Pemerintahan Umum Setda
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Bagian Kesra & Kemasyarakatan
17	Badan Kepegawaian Daerah
18	Badan Kesbang & Pembedayaan Masyarakat
19	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
21	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
22	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
23	Diskominfo
24	Disdik
25	Dinkes
26	Dinsos
27	Dishub
28	Disdukcapil
29	Disbudpar
30	DBMP
31	Diskamtam
32	DPPK
33	Disyanjak
34	Dispertapa
35	Dispora
36	Dinas KUKM dan Perindag
37	Disnaker
38	Distarcip
39	DPKAD
40	Kecamatan Sukasari
41	Kecamatan Sukajadi
42	Kecamatan Cicendo
43	Kecamatan Andir
44	Kecamatan Cidadap
45	Kecamatan Coblong
46	Kecamatan Bandung Wetan
47	Kecamatan Sumur Bandung
48	Kecamatan Cibeunying Kaler
49	Kecamatan Cibeunying Kidul
50	Kecamatan Astana Anyar
51	Kecamatan Bojongloa Kaler
52	Kecamatan Babakan Ciparay

53	Kecamatan Bojongloa Kidul
54	Kecamatan Bandung Kulon
55	Kecamatan Regol
56	Kecamatan Lengkong
57	Kecamatan Batununggal
58	Kecamatan Kiaracondong
59	Kecamatan Arcamanik
60	Kecamatan Cibiru
61	Kecamatan Antapani
62	Kecamatan Ujung Berung
63	Kecamatan Rancasari
64	Kecamatan Buah Batu
65	Kecamatan Bandung Kidul
66	Kecamatan Panyileukan
67	Kecamatan Gedebage
68	Kecamatan Mandalajati
69	Kecamatan Cinambo
70	Rumah Sakit Umum Daerah
71	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
72	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
73	PD. BPR
74	PDAM
75	PD. Kebersihan
76	PD. Pasar Bermartabat

GRAFIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI 2016 - 27 DESEMBER 2016



Dalam lampiran Perwal tersebut telah mencakup seluruh SKPD dan Kewilayahan/ Kecamatan. Seluruh PPID pembantu telah mengisi dan menyerahkan data yang diminta untuk dilengkapi dan kemudian ditayangkan ke website PPID. Maka dari itu, capaian indikator di indikator sasaran ini telah mencapai nilai **100%. 76 SKPD yang yang melapor data / 76 SKPD di Kota Bandung** Capaian ini telah **mencapai target** triwulan 4 tahun 2016 sebesar 100%.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dr. Asep C Cahyadi, M.Si menerima penghargaan pemeringkatan hasil monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP tahun 2016, pada kriteria juara ke 1 Penyusunan Standar Pelayanan dan Informasi Publik dan Juara ke 2 Pengumuman Informasi Publik Berkala yang diserahkan langsung oleh Kominfo Provinsi Jawa Barat Dr. Anton Gustomi di Gedung Sate Bandung, Kamis 15 Desember 2016

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Indikator sasaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2016 memiliki target sebesar 100%, dimana telah tepat dicapai (100%) pada triwulan 4 tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 adalah **135,13%** , pada tahun 2016 ini mengalami **penurunan capaian kinerja**, namun tetap mencapai target walaupun telah mengalami penurunan capaian kinerja

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Pemkot Bandung, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar dapat memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. membantu Pemerintah Kota Bandung menyediakan dan mengelola informasi dalam situsnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan guna mendorong perbaikan situs PPID Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” telah **berhasil mencapai target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2016.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan di **Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**. Sedangkan anggaran kegiatan terkait indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah **Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi**. Dalam melaksanakan kegiatan, digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 4.469.560.000,00, terealisasi Rp 4.383.111.989,00 (98,07%), menghasilkan output:

- Tertanganinya permohonan informasi secara cepat, tepat dan tuntas.
- Terjalannya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
- Terjalannya hubungan kerjasama dalam menuntaskan permohonan informasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu di Kota Bandung
- Tersampainya program-program pemerintah Kota Bandung dan Nasional kepada masyarakat melalui berita dan sosialisasi yang dilakukan PPID Utama Kota Bandung
- Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dan terpenuhi
- Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan Organisasi/lembaga Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2016 ini adalah:

- Pengawasan langsung oleh Pimpinan Daerah (Walikota) serta menjadikan PPID Kota Bandung sebagai salah satu tolak ukur penilaian kinerja
- Tim Pengelola dan tugas-tugas fungsi dari masing-masing personel ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung No. 480/Kep.179.Diskominfo/2015 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Tim Pengelola Data dan Informasi dari setiap SKPD yang di tetapkan melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah No. 800/839-Diskominfo Tanggal 7 Maret 2016
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Ahli PPID Utama Tahun 2016.
- Beberapa PEDASI aktif dalam pemutakhiran data untuk di upload pada website PPID menggunakan akun masing-masing yang sebelumnya di share oleh PPID Utama Kota Bandung. Data yang diupload yaitu informasi berkala dan informasi setiap saat.
- PPID Utama Kota Bandung telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis mengenai PPID untuk PPID Pembantu, PEDASI, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Sekolah Menengah Atas.
- Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Bandung, yaitu Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
- Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Bandung, yaitu:
 - ✓ Bimbingan Teknis keterbukaan informasi publik dikaitkan dengan open data bagi PEDASI
 - ✓ Bimbingan Teknis dalam penyelesaian sengketa informasi bagi PPID Pembantu
 - ✓ Bimbingan Teknis dalam pemutakhiran data pada website PPID bagi PEDASI

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2016 adalah terbatasnya anggaran Dinas di program KIM cukup berpengaruh dalam akselerasi kinerja.

- Keanekaragaman permohonan informasi sehingga tidak semua permohonan informasi dapat tertangani dalam 10 hari kerja (tergantung tingkat kecepatan koordinasi dari SKPD terkait).

- Koordinasi antara Kepala SKPD dengan PEDASI yang perlu ditingkatkan
- Kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam SOP dan mekanisme pelayanan informasi publik
- Kurangnya pemahaman para pemohon informasi dalam mengajukan permohonan informasi publik baik melalui website maupun desk layanan
- Koordinasi antara PEDASI dengan PPID Utama dalam updating data yang perlu ditingkatkan

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut. Rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah

- Pengklasifikasian permohonan informasi publik pada setiap SKPD perlu disesuaikan dengan SOP yang berlaku
- Diadakannya bimbingan teknis keterbukaan informasi public bagi para PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Diadakannya bimbingan teknis keterbukaan informasi publik dikaitkan dengan open data bagi para PEDASI di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Penjelasan secara menyeluruh melalui website PPID (<http://bandung.go.id>) tentang SOP permohonan informasi publik
- Penjelasan secara rinci kepada PEDASI perihal tata cara dan kelola data dalam website PPID
- Perlu survey atas kepuasan pelayanan permohonan informasi publik secara reguler

6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

IKM adalah suatu nilai yang diyakini bersama mewakili nilai tertentu dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai aspeknya yang menghasilkan indeks kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan suatu SKPD tertentu yang dijadikan subjek survey. Semakin tinggi nilai indeks diartikan sebagai semakin tingginya kepuasan masyarakat atas pelayanan SKPD. Semakin rendah nilai IKM, maka pelayanan masyarakat pada SKPD tersebut perlu untuk dievaluasi dan dilakukan inovasi, dan revisi. IKM di Diskominfo Kota Bandung mewakili kepuasan masyarakat akan pelayanan informasi yang menjadi tupoksi utama Diskominfo Kota Bandung.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Survey IKM dilakukan terhadap sejumlah responden yang diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Pendapat tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian dengan rentang mulai dari Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan Sangat Baik. Kemudian hasil survey tersebut diolah dan disajikan dalam suatu nilai indeks. Nilai indeks tersebut kemudian dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) untuk dikonversi ke dalam nilai mutu pelayanan yang akan berada dalam rentang 0 (nol/ Tidak Baik) sampai dengan 100 (seratus/ Sangat Baik).

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Hasil dari survey yang telah dilakukan Secara keseluruhan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat nilai dengan kategori Memuaskan dan sangat memuaskan. Dengan lampiran data sebagai berikut

No	Bidang Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Tata Usaha	81,87	Sangat Baik
2	Humas	81,27	Sangat Baik
3	PPID	82,03	Sangat Baik
4	Postel	75,15	Baik
5	Telematika	82,87	Sangat Baik
6	Radio	75,51	Baik
Jumlah		478,7	
Nilai Rata-Rata		79,78	Baik

Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) **79,78** apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah **“BAIK”**.

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada tahun 2016, Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai IKM sebesar 79,78. Nilai IKM pada tahun 2016 tersebut diatas target Renstra dimana ditetapkan sebesar 80, dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,49%. Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2015, **nilai IKM mengalami penurunan sebesar 6,18**. Dengan persentase capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 sebesar 104.67%,

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Yang menjadi output dari indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah adanya dokumen laporan survey IKM. Indikator “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” menggunakan anggaran **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** dalam mata kegiatan **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** yang telah ditetapkan sebesar Rp 707.775.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 565.752.800,00 atau sebesar (79,93 %).

Indikator kinerja “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dinilai **cukup efektif**, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada triwulan 4 tahun 2016 ini adalah aturan yang jelas mengenai apa dan bagaimana cara mengukur IKM turut membantu mempermudah dalam merealisasikan kinerja yaitu dengan berpedoman kepada

Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor timbulnya berbagai masalah yang ada di lapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam-macam. Namun berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut:

1. Masalah masyarakat (responden) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif). Hal ini penyebabnya adalah:
 - ❖ kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei IKM;
 - ❖ kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma PNS.
2. Masalah Petugas dan jumlah kuisioner kurang apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kota Bandung. Hal ini penyebabnya adalah terbatasnya anggaran dalam kegiatan survey.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka alternatif pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survei indeks kepuasan masyarakat(IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
2. Diperlukannya konsisten para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;

3. Perlunya peningkatan Anggaran dalam upaya mendukung pelaksanaan survei IKM.

7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Indikator “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditujukan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap persepsi publik, yang dalam hal ini melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak koran harian. Selain itu, indikator ini dimaksudkan untuk memunculkan citra positif Pemerintah Kota dengan mengedepankan bukti prestasi atas kinerja, bukan hanya sekedar cerita.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Berita tentang Pemerintah Kota Bandung pada indikator ini dikhususkan kepada media cetak koran. Dari berbagai koran yang terbit di Kota Bandung, dilakukan pencarian aas berita-berita terkait kinerja Pemerintah Kota Bandung. Kemudian berita-berita tersebut dikelompokkan menjadi dua, berita positif, dan berita negatif. Kedua kategori ini kemudian diperbandingkan dan dihitung rasio nya. Untuk menghitung persentase capaian indikator sasaran, dikhususkan kepada capaian berita positif, dengan memperbandingkan rata-rata capaian kinerja berita positif dalam selang waktu tertentu dengan target berita positif pada selang waktu yang sama dengan menggunakan formula:

$$\text{Capaian indikator 7} = \frac{\text{Rata - rata Persentase berita positif}}{\text{Target berita positif di RENSTRA/ RKT}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rasio jumlah berita positif dan negative selama tiga bulan pada triwulan 4 2016 dari berita 1 Oktober hingga 31 Desember adalah berita positive sebanyak 1210 dan berita negative sebanyak 230. Untuk pengukuran capaian kinerja, data tersebut akan dibandingkan dengan rasio berita positif pada target RENSTRA/ RKT tahun 2016 dengan rasio 83:17. Dengan menggunakan formulasi di atas, didapatkan angka capaian kinerja sebesar: 1210 : 1440 atau sebesar **84,03 : 15,97**





Penghargaan Humas Award (Bakohumas), pada tanggal 18 November 2016 di Hotel haris Bandung

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2016, target dari indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditetapkan sebesar 83:17. Capaian pada triwulan ini mencapai **84.03 : 15.97** (melebihi target renstra) dengan persentase capaian kinerja 101,24%, terjadi **penurunan presentase capaian kinerja 6,02%**

- e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” menggunakan anggaran di **Program kerjasama informasi dengan mas media**, kegiatan **Penyebarluasan informasi pembangunan daerah** yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 10.946.550.000,00, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 10.469.489.400,00 (95,64 %).

Sebagai output dari kegiatan yang dilakukan di indikator ini adalah:

- Terpublikasinya informasi atau program-program Pemerintah Kepada Masyarakat
- Teridentifikasinya pemberitaan baik berita positif maupun negatif
- Terjalannya komunikasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat
- Terlaksananya dialog rutin antara Pemerintah dengan Wartawan untuk Masyarakat
- Terjawabnya pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, langsung dari Narasumbernya, sehingga tidak menimbulkan berita yang simpang siur.
- Terjalannya kemitraan dengan Media
- Terbukanya informasi untuk Masyarakat

Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” telah **berhasil meningkatkan kinerja**, baik dari sisi capaian indikator, yang ditunjukkan dengan kenaikan presentase capaian kinerja, maupun dari sisi realisasi anggaran, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase realisasi anggaran, menunjukkan **perencanaan yang tepat** indikator sasaran ini.

Indikator kinerja “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” dinilai **sangat efektif**, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta **cukup efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” pada triwulan 4 tahun 2016 ini adalah:

- ❖ Adanya wadah komunikasi dan informasi aktif yang didukung dalam kegiatan “Bandung Menjawab”.
- ❖ Adanya aplikasi monitoring media yang dapat memantau pemberitaan Kota secara online

- ❖ Adanya aplikasi arsip kliping berita online yang dapat menyimpan hasil analisis segala bentuk pemberitaan Kota baik pemberitaan negatif maupun positif
- ❖ Adanya aplikasi layanan pengiriman SMS cepat yang mampu mengirim sebanyak nomor sekaligus yang bersifat satu arah
- ❖ Mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah

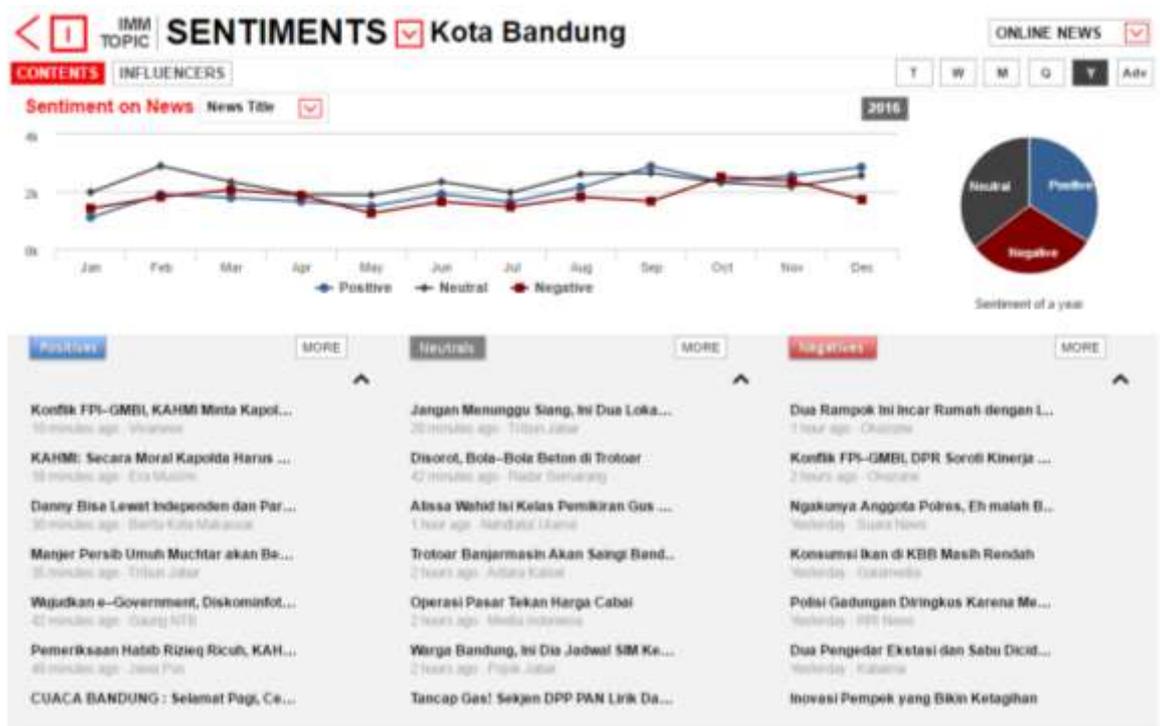
- Dalam kegiatan Bandung Menjawab, masih ada Narasumber dari SKPD Kota Bandung yang tidak hadir untuk mensosialisasikan program kerjanya atau klarifikasi atas pemberitaan negatif yang tayang di Media
- Banyak SKPD yang belum memahami pentingnya menghadiri dan menjadi Narasumber dalam kegiatan Bandung Menjawab
- Koordinasi antara SKPD dengan tim Bandung Menjawab dirasa perlu ditingkatkan kembali
- Sarana prasarana dalam pengerjaan analisis berita belum memadai
- Masih ada Media yang belum memahami tata etika sebagai Wartawan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat tersebut, kami ingin memberikan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja pada indikator sasaran ini. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah dengan

- Dibuatnya surat keputusan Walikota akan pentingnya setiap SKPD untuk menghadiri undangan Bandung Menjawab, baik dalam rangka sosialisasi program kerja maupun klarifikasi atas pemberitaan negatif yang tayang.
- Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung sehingga pekerjaan lebih efektif, dan efisien.

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media



GAMBAR 9. IMM.TODAY NEWS REPORTING & ANALYSIS

8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Standar Pelayanan Minimum Diskominfo Kota Bandung didasarkan kepada Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA. Di dalam UU dijabarkan target standar pelayanan dan panduan operasional SPM.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Perhitungan capaian kinerja indikator "Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika" didasarkan kepada Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA. Target standar pelayanan meliputi pelayanan dasar, indikator

kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. Perhitungan capaian kinerja, dengan capaian yang didapatkan pada akhir masa perhitungan kinerja, dibandingkan dengan target SPM dari Permenkominfo.

$$\text{Capaian indikator 8} = \frac{\text{Jumlah kegiatan SPM}}{\text{Target SPM berdasar Permenkominfo 22 2010}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Capaian kinerja untuk indikator “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” ini adalah: 5062 : 348 atau 1454,60 % (**jauh melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016**), dan dengan capaian kinerja sebesar 417,99%

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Persentase capaian kinerja pada LKIP tahun 2015 triwulan 4 adalah sebesar 238,33%, Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2016 1454,60%, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 1454,60%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Indikator sasaran “Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika” menggunakan anggaran di **Program kerjasama informasi dengan mas media**, kegiatan **Penyebarnya Informasi yang Bersifat penyuluhan bagi Masyarakat** yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 6.498.300.000,00, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 6.404.705.065,00 (98,56%).

Deskripsi capaian SPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun Anggaran 2016

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisai Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 1 kali;
Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat di tiap tiap kelurahan di Kota Bandung yang baru tercapai sebanyak 113 Kelurahan dan 1(satu) Forum KIM Kota Bandung;
2. Kegiatan Bimbingan teknis Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 2 kali;

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemahaman masyarakat akan program pembangunan di kota Bandung dan menambah pengetahuan masyarakat akan Teknologi Informasi;

3. Kegiatan Saresehan pada masyarakat perkotaan sebanyak 2 kali

Output dari kegiatan ini menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan program pemerintah kota Bandung melalui tatap muka

4. Kegiatan Sosialisasi Open Data sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengolah data informasi di tiap tiap SKPD yang ada di Kota Bandung

5. Kegiatan Bimbingan teknis Open Data sebanyak 3 kali;

Output dari kegiatan ini adalah membentuk pengelola data informasi yang menguasai IT, Humas dan Jurnalistik

6. Kegiatan sosialisasi PPID sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya PPID Pembantu di tiap tiap SKPD yang ada di kota Bandung

7. Kegiatan Bimbingan teknis PPID sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah selarasnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik

8. Kegiatan Pembuatan dan Updating Website PPID, Open Data Dan KIM

Output dari kegiatan tersedianya Website PPID, Open data dan KIM Kota Bandung yang up to date.

9. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang PPID dan Pengelolaan Data

Output dari kegiatan terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data secara terpusat;

10. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat

Output dari kegiatan ini tercapainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui program tatap muka.

11. Kegiatan Siaran di radio sonata oleh Forum KIM Bandung Juara Kota Bandung

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan didengarkan oleh masyarakat mengenai pemerintah kota Bandung yang dilaksanakan tiap minggu setiap hari Rabu

12. Kegiatan Scrapthon

Output merubah data yang tidak bisa dibaca oleh mesin menjadi dapat dibaca oleh mesin dan mengajak partisipasi aktif masyarakat.

13. Kegiatan Launching Open Data

Output dari kegiatan ini adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

14. Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Dengan IBM dan ABV

Output dari kegiatan ini rekomendasi kegiatan peningkatan kualitas SDM pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Realisasi Kerja Seksi Komunikasi dan Multimedia Tahun Anggaran 2016

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Operasional Majalah swara Bina Kota sebanyak 2 kali terbit dalam bentuk tabloid dan 4 kali terbit dalam bentuk CD

Output dari kegiatan terbitnya majalah Swara bina Kota selama dua (2) bulan.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik

- Dialog Interaktif di TV : 27 Kali
- Dialog Interaktif di Radio : 94 Kali
- Radio Spot : 3837 Kali
- Iklan Layanan Masyarakat : 1104 Kali

Output terlaksananya kerjasama dengan media elektronik.

3. Kegiatan Penyebarluasan masyarakat melalui Pentas Pertunjukan Rakyat

Output dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi dengan memberdayakan kebudayaan masyarakat

Output yang telah dicapai Tahun 2016 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Teknologi Informasi, meliputi kegiatan:

- ✓ Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah
- ✓ Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemkot Bandung

Indikator kinerja "Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika" dinilai **sangat efektif**, dengan hasil kinerja

melebihi dari target kinerja, serta **cukup efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah

- ✓ Tumbuhnya motivasi dengan didapatkannya 2 (dua) penghargaan atas kinerja KIM Kota Bandung.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah:

- ✓ SPM sesuai Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 memiliki target pertunjukkan rakyat yang cukup sulit untuk direalisasikan karena terkendala anggaran;
- ✓ Terbatasnya anggaran sosialisasi membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran;
- ✓ Di sisi lain, beberapa target SPM yang mudah dicapai. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian ORPAD, perlu adanya peningkatan target kinerja menuju Standar Pelayanan Prima (SPP).
- ✓ Kurangnya SDM, membuat pengerjaannya terkadang tidak maksimal

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah adanya penambahan anggaran pada program/ kegiatan pemenuhan SPM menuju Standar Pelayanan Prima. Untuk menuju SPP, diperlukan adanya kajian dan penelitian untuk menentukan target kinerja SPP dan di tambahnya SDM untuk memaksimalkan SPM.

9. Nilai evaluasi LKIP

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

LKIP adalah dokumen berisi laporan kinerja dari SKPD yang dikeluarkan secara rutin, baik dalam rentang triwulanan, maupun tahunan. LKIP menggambarkan performansi kinerja dari suatu SKPD, menunjukkan komitmen atas target yang telah dirancang pada awal masa kerja. LKIP ini kemudian dievaluasi oleh

Inspektorat Kota Bandung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik dari sisi perencanaan, formulasi penilaian, dan aspek-aspek kinerja lain yang perlu untuk dievaluasi untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Nilai evaluasi LKIP digunakan sebagai indikator untuk sasaran terciptanya Reformasi Birokrasi.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Nilai evaluasi LKIP dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ekpetansi nilai atau target yang tertera di Renstra Diskominfo.

Persentase capaian kinerja indikator dihitung dengan formula:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Nilai evaluasi LKIP yang diterima}}{\text{Target nilai evaluasi LKIP}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Nilai evaluasi LKIP didapatkan dari hasil penilaian oleh Inspektorat Kota Bandung melalui dokumen nomor **710/09-Inpektorat**, perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2016. Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai LKIP sebesar **65.25 (enam puluh lima koma dua lima)** dengan **kategori B (Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Nilai ini berada di atas target triwulan 4 Renstra 2013-2018 yang ditetapkan, sebesar 65.

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{65.25}{70} \times 100\% = \mathbf{93,21\%}$$

Menghasilkan presentase kinerja pada indikator sasaran Nilai Evaluasi LAKIP sebesar **93,21% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2016)**.

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015, dimana target yang ditetapkan adalah nilai LKIP 54, dan nilai LKIP yang didapatkan adalah 100,61% Dengan demikian persentase capaian kinerja yang didapatkan pada triwulan 4 tahun 2016 adalah sebesar 93,21%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja triwulan 4 tahun 2015, terjadi sedikit penurunan yang tidak signifikan (sebesar 7,4%). Namun capaian kinerja dari tahun 2016 dapat dipertahankan di atas target yang telah ditetapkan. Ini **menunjukkan perbaikan**

dan peningkatan kinerja, dimana **target perencanaan dapat dicapai** dengan baik dalam dua tahun terakhir ini

- e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Sebagai output dari indikator “Nilai evaluasi LKIP” adalah:

- ✓ Adanya dokumen LKIP triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- ✓ Adanya dokumen LKIP tahun 2015, dan 2016;
- ✓ Terbentuknya komitmen Dinas dalam mendukung SAKIP Juara;
- ✓ Tersusunnya SOP pengumpulan data SAKIP;

Indikator “Nilai Evaluasi LKIP” ini didukung oleh anggaran pada **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, di kegiatan **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** yang telah dianggarkan sebesar Rp 707.775.000,00. Dimana dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 565.752.800,00 (79,93%).

Berdasarkan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, didapatkan memang didapatkan penurunan capaian kinerja. Namun penurunan tersebut bukan berarti penurunan kinerja, namun justru **peningkatan**, dikarenakan target kinerja yang juga naik/ lebih tinggi dari target pada tahun sebelumnya **dapat dicapai** dan diikuti oleh **efisiensi anggaran**.

Indikator kinerja “Nilai Evaluasi LKIP” dinilai **cukup efektif**, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

- f. **Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2016 ini adalah:

- ❖ Koordinasi yang baik dengan Bagian OPRPAD Kota Bandung membantu menghasilkan LKIP yang berkualitas, dan tepat waktu;
- ❖ Ditindaklanjutinya evaluasi dan masukkan yang diberikan ORPAD, dan Inspektorat terkait LKIP SKPD turut berperan dalam menghasilkan LKIP yang lebih baik lagi.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ❖ Kurangnya kesadaran akan pentingnya LKIP oleh para pemegang program, menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan data karena LKIP tidak menjadi prioritas utama; dan
- ❖ Penjadwalan laporan yang terkadang bentrok sehingga tidak tertangani dengan maksimal.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Sosialisasi internal akan pentingnya LKIP di lingkungan Dinas dengan mengundang Bagian ORPAD/ Inspektorat/ BAPPEDA Kota Bandung sebagai narasumber;
- ❖ Perlu adanya koordinasi yang *real-time* antara pemilik kepentingan dan pelaksana pembuat laporan kinerja, baik di bidang anggaran maupun kinerja, untuk penjadwalan laporan agar tidak terjadi load pekerjaan yang menumpuk di suatu waktu.

10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan memberikan masukan serta rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. INSpektorat adalah lembaga internal Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi atas berjalannya system birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, baik dari sisi keuangan, prosedur, dan sebagainya.

Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen berisi temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Melakukan tindak lanjut atas temuan adalah hal mutlak bagi berjalannya birokrasi yang bersih, dan melayani.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan jumlah total temuan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 10} = \frac{\text{Jumlah temuan BPK Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah temuan}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Hingga akhir triwulan 4, hasil dari pemeriksaan BPK belum didapatkan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pengelolaan anggaran, didapatkan **1 (satu) temuan** pengelolaan anggaran, dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti (**100%**) (**mencapai target**).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang sama dengan tahun 2016 pada angka **capaian 100%**. Ini **menunjukkan kinerja dalam mempertahankan kinerja**.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari kegiatan pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” adalah dokumen jawaban/ tanggapan Dinas atas temuan dari BPK/ Inspektorat.

Indikator ini menggunakan anggaran di **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** yang ditetapkan sebesar Rp 932.775.000,00 dan sudah di realisasi sebesar Rp 735.975.700,00 (**78,90%**).

Indikator kinerja “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” dinilai **efektif**, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah komunikasi yang baik internal SKPD, dan dengan pihak evaluator.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Di indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” tidak menemukan hambatan yang berarti karena kegiatan terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam mengeluarkan jawaban atas temuan

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut adalah adanya penjadwalan kinerja antar berbagai pemilik kepentingan yang terkait (Inspektorat, BPK) sehingga pada saat masa pelaporan LKIP, SKPD sudah memiliki data yang diperlukan.

E. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan percepatan pencapaian target kinerja Renstra, perlu disusun rencana aksi yang akan mendukung pencapaian serta persiapan penyusunan rencana kerja tahun 2016.

Capaian yang sudah maksimal akan dilakukan peninjauan untuk peningkatan kinerja di tahun 2016. Beberapa indikator kinerja yang akan mengalami perubahan di antara nya

SEBELUM	SESUDAH
Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase Penurunan Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat

Untuk melakukan perubahan terhadap indikator kinerja tersebut perlu dilakukan kajian studi yang melibatkan beberapa pihak, terutama Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung, BAPPEDA Kota Bandung, Inspektorat kota Bandung, akademisi dan professional pemerintahan (Kementrian PAN-RB) untuk berkonsultasi, melakukan evaluasi, sekaligus monitoring proses perencanaan kinerja yang berada di Diskominfo Kota Bandung.

Selain perubahan indikator, evaluasi terhadap indikator yang sudah mencapai target Renstra perlu dilakukan evaluasi. Apakah akan mengalami perubahan atau hanya perubahan pada bentuk kegiatannya saja tanpa merubah nomenklatur indikator sasaran yang tertera pada Renstra 2013-2018 Diskominfo Kota Bandung. Beberapa indikator sasaran yang telah mencapai target renstra diantaranya:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung;
5. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

F. KESIMPULAN/ PENUTUP

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Desember 2016
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DR. ASEP C. CAHYADI, M.S.i
Pembina Tk. I
NIP. 19680311 199403 1 009